



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

2026



Pemerintah Kota Batam **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Jalan Raja Haji No. 03 Telp. (0778) 323429 Fax. (0778) 327794

Email : Dinas_KP2_KotaBatam@yahoo.com

SEKUPANG - BATAM



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

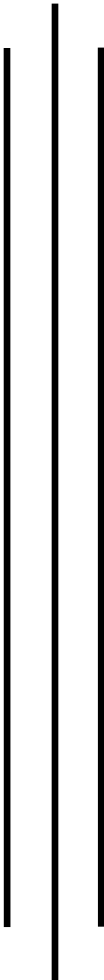
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XX : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2026 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat Rencana Kerja sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2026 suatu dokumen perubahan perencanaan program dan kegiatan Tahun 2026. Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan suatu dokumen perencanaan program perubahan tahunan dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan dan program khususnya di bidang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan di Kota Batam.

Perubahan Rencana Kerja ini menjadi acuan segenap satuan kerja dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan. Tugas membangun sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan ke depan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Batam, 19 Agustus 2026
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Batam



Mardanis, AMP, SE, MH
Pembina Utama Muda
NP. 19680714 198811 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB. II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026	
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB. IV PENUTUP	
4.1 Catatan Penting	34
4.2 Kaidah Pelaksanaan.....	34
4.3 Rencana Tindak Lanjut	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.....	7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam sampai dengan triwulan II Tahun 2026 .	16
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2026	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;

- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
7. Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025–2029
8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Peraturan Wali Kota Batam No 81 Tahun 2025 Tentang Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tahun 2025-2029
10. Peraturan Wali Kota Batam No 33 Tahun 2026 Tentang Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026

11. Surat Edaran Wali Kota Batam No 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2026

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan) 2026
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Adapun Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang rencana :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

C. Program Penanganan Kerawanan Pangan

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

D. Program Pengawasan Keamanan Pangan

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Berjalan Sampai dengan Triwulan II

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	74 Nilai	0	0.00%	
	[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan]	Indeks pelayanan kesekretariatan PD	80 Nilai	0	0.00%	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 Persen	16.67	16.67%	
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	0.00%	
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2	50.00%	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	50%	0.50%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	67	100.00%	
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6	50.00%	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	9.5 %	0	0.00%	
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0	0.00%	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	65	65.00%	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	100.00%	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4	80.00%	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	0.00%	
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1	50.00%	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6	600.00%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	100 Persen	11.54	11.54%	
2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1	100.00%	
2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	0	0.00%	
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	19	190.00%	
20901208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	50	50.00%	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6	600.00%	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	0.00%	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksanakan	100 %	79.49	79.49%	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1	100.00%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	8	50.00%	
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	23	115.00%	
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2	100.00%	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi	2611 kkal per kapita per	0	0.00%	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras)	154 kkal per kapita per	0	0.00%	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	0	0.00%	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda	100 %	0	0.00%	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Ton	0	0.00%	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan peserta yang mengikuti LCM, Demo Masak B2SA dan B2SA Goes to School	12 Kecamatan	0	0.00%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	0	0.00%	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan/Rawan Pangan	3.13 %	0	0.00%	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kelurahan rentan pangan yang diidentifikasi	2 Kelurahan	0	0.00%	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	0	0.00%	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran bantuan CPD terhadap kelurahan rentan pangan, terdampak bencana, stunting	1.6 Ton	0	0.00%	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0.00%	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100 %	0	0.00%	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	umlah sampel PSAT yang diuji	15 Sampel	0	0.00%	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	60 Dokumen	0	0.00%	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Peningkatan Produksi Pertanian	176.37 Ton	0	0.00%	
		Jumlah Peningkatan Produksi Pternakan	3 Ekor	0	0.00%	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas Tanam pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	3099.8 Ha	789.9	25.48%	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	0	0.00%	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	0	0.00%	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi hewan ternak sapi	22 Ekor	38	172.73%	
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	0	0.00%	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	92 %	0	0.00%	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji	100 %	0	0.00%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	6 Wilayah	0	0.00%	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	35.38 %	39.71	112.24%	
3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	15 Unit Usaha	110	733.33%	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	10 %	7.45	74.50%	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	100 %	75	75.00%	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	0	0.00%	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	274	2283.33%	
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	7 Orang	0	0.00%	
	UPTD RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS					
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	65.5 %	62.6	95.57%	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	120 Unit	113	94.17%	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	2	100.00%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN					
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	65.5 %	62.6	95.57%	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	120 Unit	113	94.17%	
3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1	100.00%	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	94 %	0	0.00%	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskesmas	2350 Layanan	1423	60.55%	
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Laporan	6	50.00%	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	6	50.00%	

- F. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - G. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
- Adapun Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang rencana tidak dikareanakan pengukuran baru pada TW II
- A. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - 1. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - B. Program Penyuluhan Pertanian
 - 1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Berjalan Sampai dengan Triwulan II

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	74 Nilai	0	0.00%	
	[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan]	Indeks pelayanan kesekretariatan PD	80 Nilai	0	0.00%	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 Persen	16.67	16.67%	
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	0.00%	
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2	50.00%	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	50%	0.50%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	67	100.00%	
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6	50.00%	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	9.5 %	0	0.00%	
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0	0.00%	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	65	65.00%	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	100.00%	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4	80.00%	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	0.00%	
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1	50.00%	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6	600.00%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	100 Persen	11.54	11.54%	
2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1	100.00%	
2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	0	0.00%	
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	19	190.00%	
20901208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	50	50.00%	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6	600.00%	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	0.00%	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksanakan	100 %	79.49	79.49%	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1	100.00%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	8	50.00%	
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	23	115.00%	
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2	100.00%	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi	2611 kkal per kapita per	0	0.00%	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras)	154 kkal per kapita per	0	0.00%	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	0	0.00%	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda	100 %	0	0.00%	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Ton	0	0.00%	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan peserta yang mengikuti LCM, Demo Masak B2SA dan B2SA Goes to School	12 Kecamatan	0	0.00%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	0	0.00%	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan/Rawan Pangan	3.13 %	0	0.00%	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kelurahan rentan pangan yang diidentifikasi	2 Kelurahan	0	0.00%	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	0	0.00%	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran bantuan CPD terhadap kelurahan rentan pangan, terdampak bencana, stunting	1.6 Ton	0	0.00%	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0.00%	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100 %	0	0.00%	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	umlah sampel PSAT yang diuji	15 Sampel	0	0.00%	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	60 Dokumen	0	0.00%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Peningkatan Produksi Pertanian	176.37 Ton	0	0.00%	
		Jumlah Peningkatan Produksi Peternakan	3 Ekor	0	0.00%	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas Tanam pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	3099.8 Ha	789.9	25.48%	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	0	0.00%	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	0	0.00%	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi hewan ternak sapi	22 Ekor	38	172.73%	
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	0	0.00%	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	92 %	0	0.00%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji	100 %	0	0.00%	
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	6 Wilayah	0	0.00%	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	35.38 %	39.71	112.24%	
3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	15 Unit Usaha	110	733.33%	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	10 %	7.45	74.50%	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	100 %	75	75.00%	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	0	0.00%	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	274	2283.33%	
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	7 Orang	0	0.00%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
	UPTD RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS					
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	65.5 %	62.6	95.57%	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	120 Unit	113	94.17%	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	2	100.00%	
	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN					
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	65.5 %	62.6	95.57%	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	120 Unit	113	94.17%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RENJA 2026)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5	6=5/4*100	
3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1	100.00%	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	94 %	0	0.00%	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskesmas	2350 Layanan	1423	60.55%	
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Laporan	6	50.00%	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	6	50.00%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang dibentuk pada Tahun 2016 sesuai dengan Daerah No 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 10 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sedangkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tertuang dalam Peraturan Walikota Batam Nomor : 33 Tahun 2024.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	89	SKor		SKor	Belum Bisa diukur
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	7,80	%		%	Belum Bisa diukur
3	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	86	%		%	Belum Bisa diukur
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,2	SKor		SKor	Belum Bisa diukur
5	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	0,75	%		%	Belum Bisa diukur
6	Persentase Peningkatan Produksi Ternak	13,04	%		%	Belum Bisa diukur
7	Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal	92	%		%	Belum Bisa diukur
8	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	90.15	Poin		Poin	Belum Bisa diukur

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis yang dihadapi di Indonesia juga terjadi di Kota Batam, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan. Isu-isu strategis tersebut antara lain laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, legalitas lahan pertanian, regulasi/kelembagaan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang tergantung pada beras. Tidak sebandingnya hasil produksi pertanian dan peternakan dengan jumlah penduduk Kota Batam sehingga diperlukan peningkatan hasil pertanian dan peternakan dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada (Intensifikasi Pertanian) dan meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian dan peternakan yang sebelumnya di manfaatkan sebagai lahan pertanian (Ekstensifikasi Pertanian).

Berikut adalah beberapa isu strategis terkait ketahanan pangan dan pertanian.

1. Diversifikasi Pangan
upaya untuk memperbanyak jenis makanan yang dikonsumsi, tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok seperti beras. Tujuannya adalah untuk meningkatkan asupan gizi, mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan, dan mendukung ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan potensi pangan lokal.
2. Kualitas dan Keamanan Pangan
PSAT yang aman memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi tidak mengandung zat berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit
3. Meningkatkan Penggunaan dan pengawasan sarana, prasarana pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian dan peternakan
4. Urban Farming
Praktik bercocok tanam di daerah perkotaan, memanfaatkan lahan terbatas seperti pekarangan, atap gedung, atau bahkan dalam ruangan
5. Keterbatasan Lahan pertanian dan Alih Fungsi Lahan
Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, seperti perumahan, industri, atau fasit mengurangi ketersediaan lahan untuk produksi pertanian dan berdampak negatif pada ketahanan pangan, mata pencaharian petani, dan lingkungan.
6. Kesehatan Hewan
Meningkatkan Pengendalian penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosi
Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) menjadi ancaman serius bagi peternakan, terutama sapi sehingga sampai saat ini pada tahun 2026 belum bisa pengadaan sapi bantuan untuk masyarakat.
Tatalaksana dan manajemen operasional pelayanan yang belum maksimal di UPTD Puskesmas seiring dengan kebutuhan peningkatan kualitas dan keterjangkauan pelayanan
Peningkatan kualitas Rumah Potong Hewan (RPH) yang berstandar higienis dan sanitasi untuk menjamin keamanan dan mutu produk hewani bagi masyarakat

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dengan Indikator Nilai Sakip Pd dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Target RKPD 2026 adalah 74 Nilai dan 80 Nilai untuk perubahan RKPD 2026 menjadi 73,60 Nilai 90,32 Nilai. Pagu RKPD 2026 awal sebesar Rp17.001.399.859. Mengalami rasionalisasi/perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp14.653.897.259 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp14.969.498.059.
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 13,738,000.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 3,178,000.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 3,178,000.00. Target Indikator Tidak Ada Perubahan.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 7,504,600.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 2,224,600.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 2,224,600.00. Target Indikator Tidak Ada Perubahan.
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 6,233,400.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 953,400.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 953,400.00. Target Indikator Tidak Ada Perubahan.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 15,685,561,723.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 13,421,928,523.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 12,138,696,959.00. Target Indikator Tidak Ada Perubahan.

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 15,643,081,723.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 13,382,598,523.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 12,099,366,959.00. Target Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dari 72 Orang/bulan menjadi 67 Orang/bulan.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 42,480,000.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 39,330,000.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 39,330,000.00. Target Indikator tidak ada Perubahan.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Anggaran dan indikator tidak ada perubahan
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 Anggaran dan indikator tidak ada perubahan.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 202,764,700.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 177,328,936.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 199,452,736.00. Target Indikator tidak ada Perubahan.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 9,219,300.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 4,103,000.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 4,103,000.00. Target Indikator tidak ada Perubahan.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 51,411,100.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 86,460,336.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 108,584,136.00. Target tidak ada Perubahan.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 17,770,500.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 1,024,800.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 1,024,800.00. Target Indikator tidak ada Perubahan.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran tidak ada perubahan. Target Indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen menjadi 1 Dokumen.
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 122,393,400.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 83,770,400.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 83,770,400.00. Target Indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan menjadi 12 Laporan
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Anggaran tidak ada Perubahan. Target Indikator ada Perubahan
 - b. Pengadaan Mebel
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 71,523,000.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 71,523,000.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 360,999,726.00. Target Indikator Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit menjadi 52 Unit.
 - c. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penambahan Rp. 500.000.000 Target Indikator Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit.
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 270,156,000.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 279,142,000.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 279,142,000.00. Target Indikator tidak ada Perubahan.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 39,710,000.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 42,840,000.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 42,840,000.00. Target Indikator tidak ada Perubahan.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 113,600,000.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 119,456,000.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 119,456,000.00. Target Indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit Menjadi 16 Unit.
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran tidak ada Perubahan. Target Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit Menjadi 45 Unit.
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran tidak ada Perubahan. Target Indikator ada Perubahan.
- B. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
- Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 889,250,100.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 889,084,500.00 dan P-RKPD 2026 menjadi 889,084,500.00. Target Indikator tidak ada Perubahan.
1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 85,580,000.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 85,922,000.00 dan P-RKPD 2026 menjadi 85,922,000.00. Target Indikator tidak ada Perubahan.
 - a. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 85,580,000.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 85,922,000.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 85,922,000.00. Target Indikator tidak ada Perubahan.
 2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 69,650,000.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 69,650,000.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 69,650,000.00. Target Indikator tidak ada Perubahan.
 - a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Anggaran tidak ada Perubahan. Target Indikator ada Perubahan.

3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 734,020,100.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 733,512,500.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 733,512,500.00. Target Indikator tidak ada Perubahan.

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 734,020,100.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 733,512,500.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 733,512,500.00. Target Indikator tidak ada Perubahan.

C. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 90,139,800.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 90,559,800.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 90,559,800.00. Target Indikator tidak ada Perubahan.

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 62,700,000.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 62,850,000.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 62,850,000.00. Target Indikator tidak ada Perubahan

- a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 62,700,000.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 62,850,000.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 62,850,000.00. Target Indikator tidak ada Perubahan

2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 27,439,800.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 27,709,800.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 27,709,800.00. Target Indikator tidak ada Perubahan.

- a. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 27,439,800.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 27,709,800.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 27,709,800.00. Target Indikator tidak ada Perubahan.

D. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 148,753,100.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 138,556,700.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 138,556,700.00. Target Indikator tidak ada Perubahan

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 148,753,100.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 138,556,700.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 138,556,700.00. Target Jumlah sampel PSAT yang diuji 15 sampel menjadi 48 Sampel.

a. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 148,753,100.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 138,556,700.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 138,556,700.00. Target Indikator Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 60 Dokumen menjadi 12 Dokumen

E. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 5,833,929,740.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 5,520,635,740.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 6,996,735,540.00. Target Indikator Jumlah Peningkatan Produksi Pertanian dan Jumlah Peningkatan Produksi Peternakan 176,37 Ton dan 10 Ekor Menjadi 176,37 Ton dan 3 Ekor

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 5,347,728,540.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 5,047,728,540.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 6,523,828,340.00. Target Indikator tidak ada perubahan.

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Anggaran tidak ada perubahan. Target indikator Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 3 Dokumen menjadi 1 Dokumen.

b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 5,334,078,540.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 5,034,078,540.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 6,510,178,340.00. Target Indikator Tidak ada Perubahan.

2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 486,201,200.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 472,907,200.00 dan P-RKPD

2026 menjadi Rp 472,907,200.00. Target Indikator Jumlah Produksi hewan ternak sapi 22 ekor menjadi 26 ekor.

- a. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.
Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 486,201,200.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 472,907,200.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 472,907,200.00. Target Indikator tidak ada perubahan.

F. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 363,940,400.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 358,384,000.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 358,384,000.00. Target Indikator Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis 92% menjadi 94%.

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota.
Anggaran tidak ada perubahan dan target indikator tidak ada perubahan.
 - a. Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan.
Anggaran tidak ada perubahan dan target indikator tidak ada perubahan.
2. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 73,082,600.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 67,526,200.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 67,526,200.00. target indikator tidak ada perubahan
 - a. Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 73,082,600.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 67,526,200.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 67,526,200.00. target indikator Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi 15 Unit Usaha menjadi 98 Unit Usaha.

G. Program Penyuluhan Pertanian.

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 1,005,071,700.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 808,995,900.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 788,996,800.00. target indikator tidak ada perubahan.

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 1,005,071,700.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 808,995,900.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 788,996,800.00. target indikator tidak ada perubahan.

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 14,320,600.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 14,320,600.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 0.00. target indikator Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 unit menjadi 0 unit dikarenakan Pemerintah resmi menarik kewenangan dan status kepegawaian Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari daerah kabupaten/kota menjadi ASN pusat di bawah Kementerian Pertanian .

b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 916,342,800.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 788,996,800.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 788,996,800.00. target indikator Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 unit menjadi 242 Unit.

c. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 74,408,300.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 5,678,500.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 0.00. target indikator Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 5 Orang menjadi 0 unit dikarenakan Pemerintah resmi menarik kewenangan dan status kepegawaian Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari daerah kabupaten/kota menjadi ASN pusat di bawah Kementerian Pertanian.

UPTD RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS

A. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 782,382,900.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 773,305,800.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 773,305,800.00. target indikator Tidak ada perubahan.

1. Pembangunan Prasarana Pertanian.

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 782,382,900.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 773,305,800.00 dan P-RKPD

2026 menjadi Rp 773,305,800.00. target indikator Tidak ada perubahan.

- a. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 782,382,900.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 773,305,800.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 773,305,800.00. target indikator Tidak ada perubahan.

UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN

B. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 456,024,600.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 440,374,600.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 440,374,600.00. target indikator Tidak ada perubahan.

2. Pembangunan Prasarana Pertanian.

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 456,024,600.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 440,374,600.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 440,374,600.00. target indikator Tidak ada perubahan.

- a. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas

Anggaran RKPD 2026 awal sebesar Rp 456,024,600.00. Mengalami perubahan pada APBD 2026 menjadi Rp 440,374,600.00 dan P-RKPD 2026 menjadi Rp 440,374,600.00. target indikator Tidak ada perubahan.

C. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Anggaran RKPD 2026 tidak ada perubahan. target indikator Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis 92 % menjadi 94%.

1. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran RKPD 2026 tidak ada perubahan target indikator tidak ada perubahan

- a. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium

Anggaran RKPD 2026 tidak ada perubahan. target indikator tidak ada perubahan

- b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Anggaran RKPD 2026 tidak ada perubahan. target indikator tidak ada perubahan

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target
dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2026. tahun berjalan 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			Ket
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						25,332,484,699.00	23,448,583,835.00	(1,883,900,864.00)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18,129,542,859.00	15,304,467,495.00	(2,825,075,364.00)	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						18,129,542,859.00	15,304,467,495.00	(2,825,075,364.00)	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD INDEKS PELAYANAN KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP PD INDEKS PELAYANAN KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH	74 Nilai 80 Nilai	73,60 Nilai 90,32 Nilai	17,001,399,859.00	14,186,266,495.00	(2,815,133,364.00)	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 Persen	100 Persen	13,738,000.00	3,178,000.00	(10,560,000.00)	
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	7,504,600.00	2,224,600.00	(5,280,000.00)	
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	6,233,400.00	953,400.00	(5,280,000.00)	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	15,685,561,723.00	12,138,696,959.00	(3,546,864,764.00)	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	67 Orang/bulan	15,643,081,723.00	12,099,366,959.00	(3,543,714,764.00)	
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	42,480,000.00	39,330,000.00	(3,150,000.00)	
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	9.5 %	9.5 %	67,462,000.00	67,462,000.00	-	
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	6 Orang	67,462,000.00	67,462,000.00	-	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	202,764,700.00	199,452,736.00	(3,311,964.00)	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			Ket										
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih											
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9,219,300.00		4,103,000.00		(5,116,300.00)									
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	51,411,100.00		108,584,136.00		57,173,036.00									
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17,770,500.00		1,024,800.00		(16,745,700.00)									
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12 Dokumen	1,970,400.00		1,970,400.00		-									
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	122,393,400.00		83,770,400.00		(38,623,000.00)									
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	540,877,800.00		1,330,354,526.00		789,476,726.00									
2	09	01	2.07	1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit			500,000,000.00											
2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	292,020,000.00		292,020,000.00		-									
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	52 Unit	71,523,000.00		360,999,726.00		289,476,726.00									
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	25 Unit	177,334,800.00		177,334,800.00		-									
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	220,839,636.00		167,980,274.00		(52,859,362.00)									
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	178,980,000.00		167,980,274.00		(10,999,726.00)									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			Ket										
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih											
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan	41,859,636.00		-		(41,859,636.00)									
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	270,156,000.00		279,142,000.00		8,986,000.00									
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39,710,000.00		42,840,000.00		3,130,000.00									
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	16 Unit	113,600,000.00		119,456,000.00		5,856,000.00									
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	45 Unit	30,450,000.00		30,450,000.00		-									
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	86,396,000.00		86,396,000.00		-									
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi	Ketersediaan Energi	2611 :kcal per kapita per	2611 :kcal per kapita per	889,250,100.00		889,084,500.00		(165,600.00)									
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras)	Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras)	154 kkal per kapita per	154 kkal per kapita per	85,580,000.00		85,922,000.00		342,000.00									
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	85,580,000.00		85,922,000.00		342,000.00									
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda	100 %	100 %	69,650,000.00		69,650,000.00		-									
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Ton	3.5 Ton	69,650,000.00		69,650,000.00		-									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			Ket									
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih										
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan peserta yang mengikuti LCM, Demo Masak B2SA dan B2SA Goes to School	Cakupan peserta yang mengikuti LCM, Demo Masak B2SA dan B2SA Goes to School	12 Kecamatan	12 Kecamatan	734,020,100.00	733,512,500.00	(507,600.00)										
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	734,020,100.00	733,512,500.00	(507,600.00)										
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan/Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan/Rawan Pangan	3,13 %	3,13 %	90,139,800.00	90,559,800.00	420,000.00										
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kelurahan rentan pangan yang diidentifikasi	Jumlah kelurahan rentan pangan yang diidentifikasi	2 Kelurahan	2 Kelurahan	62,700,000.00	62,850,000.00	150,000.00										
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	62,700,000.00	62,850,000.00	150,000.00										
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran bantuan CPD terhadap kelurahan rentan pangan, terdampak bencana, stunting	Jumlah penyaluran bantuan CPD terhadap kelurahan rentan pangan, terdampak bencana, stunting	1,6 Ton	1,6 Ton	27,439,800.00	27,709,800.00	270,000.00										
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	27,439,800.00	27,709,800.00	270,000.00										
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100 %	100 %	148,753,100.00	138,556,700.00	(10,196,400.00)										
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	umlah sampel PSAT yang diuji	umlah sampel PSAT yang diuji	15 Sampel	48 Sampel	148,753,100.00	138,556,700.00	(10,196,400.00)										
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	60 Dokumen	12 Dokumen	148,753,100.00	138,556,700.00	(10,196,400.00)										
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					7,202,941,840.00	8,144,116,340.00	941,174,500.00										
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					7,202,941,840.00	8,144,116,340.00	941,174,500.00										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			Ket									
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih										
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan Komoditas Peternakan	Peningkatan Produksi Pertanian Jumlah Peningkatan Produksi Peternakan	176,37 Ton 10 Ekor	176,37 Ton 3 Ekor	5,833,929,740.00	6,996,735,540.00	1,162,805,800.00										
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas Tanam pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	Luas Tanam pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	3099,84 Ha	3099,84 Ha	5,347,728,540.00	6,523,828,340.00	1,176,099,800.00										
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	1 Laporan	13,650,000.00	13,650,000.00	-										
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	5,334,078,540.00	6,510,178,340.00	1,176,099,800.00										
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi hewan ternak sapi	Jumlah Produksi hewan ternak sapi	22 Ekor	26 Ekor	486,201,200.00	472,907,200.00	(13,294,000.00)										
3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	486,201,200.00	472,907,200.00	(13,294,000.00)										
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	92 %	94%	363,940,400.00	358,384,000.00	(5,556,400.00)										
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji	100 %	100 %	290,857,800.00	290,857,800.00	-										
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	6 Wilayah	6 Wilayah	290,857,800.00	290,857,800.00	-										
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	35.38 %	39. 71%	73,082,600.00	67,526,200.00	(5,556,400.00)										
3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	15 Unit Usaha	110 Unit Usaha	73,082,600.00	67,526,200.00	(5,556,400.00)										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			Ket									
											Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Selisih							
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	10 %	10 %	1,005,071,700.00	788,996,800.00	(216,074,900.00)										
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	100 %	100 %	1,005,071,700.00	788,996,800.00	(216,074,900.00)										
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	0 Unit	14,320,600.00	-	(14,320,600.00)										
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	281 Unit	916,342,800.00	788,996,800.00	(127,346,000.00)										
3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	0 Orang	74,408,300.00	-	(74,408,300.00)										
					UPTD RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS	UPTD RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS					782,382,900.00	773,305,800.00	(9,077,100.00)										
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					782,382,900.00	773,305,800.00	(9,077,100.00)										
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					782,382,900.00	773,305,800.00	(9,077,100.00)										
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	65.5 %	65.5 %	782,382,900.00	773,305,800.00	(9,077,100.00)										
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	120 Unit	120 Unit	782,382,900.00	773,305,800.00	(9,077,100.00)										
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	2 Unit	782,382,900.00	773,305,800.00	(9,077,100.00)										
					UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN					998,806,500.00	983,156,500.00	(15,650,000.00)										
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					998,806,500.00	983,156,500.00	(15,650,000.00)										
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					998,806,500.00	983,156,500.00	(15,650,000.00)										
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	65.5 Persen	65.5 Persen	456,024,600.00	440,374,600.00	(15,650,000.00)										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			Ket	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	120 Unit	120 Unit	456,024,600.00	440,374,600.00	(15,650,000.00)	
3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	456,024,600.00	440,374,600.00	(15,650,000.00)	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	92 %	94%	542,781,900.00	542,781,900.00	-	
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskesmas	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskesmas	2350 Layanan	2350 Layanan	542,781,900.00	542,781,900.00	-	
3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Laporan	12 Laporan	237,196,300.00	237,196,300.00	-	
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	305,585,600.00	305,585,600.00	-	
J U M L A H											27,113,674,099	25,205,046,135	(1,908,627,964.00)	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Ketahanan dan Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rencana pelaksanaan di bulan Juli dan Agustus tetapi pencairan di bulan September
2. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan karena dilaksanakan di bulan Juni, Pemaparan laporan akhir NBM dilaksanakan di minggu pertama bulan Agustus.
3. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota karena Pengadaan CPP masih belum terlaksana karena belum terdapat juknis dari BULOG Pusat
4. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi karena Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli
5. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan masih menunggu data indikator SAE dari BAPANAS
6. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota karena Belum ada laporan Masyarakat yang terkena bencana
7. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota karena Pengujian baru dilaksanakan di bulan Juli dan menunggu hasil uji lab.

maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkan renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target - target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD